

MODEL KONSENSUS DAN REKONSILIASI KONFLIK ANTAR-UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL

Muhajir Al Fairusy

Dosen Tetap pada STIS Al-Hilal, Sigli

ABSTRAK

Beberapa kali potensi dan percikan kasus konflik antarumat beragama di Singkil (sejak awal tahun 2000), dan disorot oleh banyak media, ternyata berimbas meluas pada masyarakat Aceh (secara kolektif), yang berindikasi pada klaim intoleran oleh publik luar. Apalagi, situasi ini terjadi di tengah gencarnya regulasi penerapan Syariat Islam. Jika merujuk pada pondasi persoalan, posisi Singkil sebagai wilayah perbatasan Aceh, yang didiami oleh multi etnik dan agama, menjadikan wilayah ini "rawan" meletus konflik atas nama multikultural. Situasi ini, kian menciptakan jarak sosial dan budaya antarmanusia. Kepentingan kelompok semakin besar, dan cenderung mengabaikan sisi kemanusiaan antarpemeluk agama. Padahal, tujuan agama, terutama Islam menuntut penganutnya, untuk mengedepankan rasa kemanusiaan paling tinggi, terutama lewat sisi kemanusiaan. Apalagi, implementasi Syariat Islam di Aceh, sisi toleransi umat beragama seyogyanya menjadi sektor paling diperhatikan dalam menopang peradaban Islam yang humanis di Aceh dan jauh dari kesan intoleran. Kajian ini adalah sebuah usaha untuk memetakan jejak rekam konflik antarumat beragama di Aceh Singkil, dan upaya rekonsiliasi damai yang dibangun kembali karena kesadaran akan faktor klan. Selain itu, kajian ini, berupaya meneropong kembali rekam jejak konsensus dan lesson learn benih-benih perdamaian di Aceh Singkil. Karena itu, menarik melihat bagaimana dialektika damai antarumat beragama seharusnya direkonstruksi secara serius, di tengah kondisi rakyat Indonesia yang sedang bergerak menuju wajah Islam Nusantara. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan sosial, dan paradigma keislaman. Teknik pengumpulan data melalui Library Research (kajian kepustakaan), dan wawancara dengan informan yang dianggap profesional terhadap kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran dan pengaruh kesadaran akan klan dan etnik begitu besar, dalam upaya rekonsiliasi konflik atas nama agama, guna menjaga keseimbangan sosial antarmanusia di wilayah multikultural seperti Aceh Singkil. Di sisi lain, Syariat Islam di Aceh, dengan mengonsumsi wacana toleransi, tampak mulai ikut memunculkan sisi kemanusiaan dalam menangani beberapa kasus intoleransi yang dapat muncul kapan saja di perbatasan Aceh.

Kata Kunci : *Konsensus, Rekonsiliasi Konflik, Umat Beragama di Singkil.*

A. Pendahuluan

Seorang masyarakat di Kecamatan Rimo bercerita pada saya, awal tahun 2008, hampir saja meletus konflik antar-umat beragama di Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Konflik dipicu oleh pemasangan beberapa gereja kecil (Singkil : *Udung-udung*), oleh beberapa oknum masyarakat yang menetap di kecamatan tersebut. Apalagi, saat itu merupakan tahun pertama berjalannya

program pengiriman “dai perbatasan” oleh Dinas Syariat Islam Aceh, ke berbagai pelosok kecamatan yang ada di kabupaten perbatasan Aceh. Seperti Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Luwes, Kota Langsa, dan Kabupaten Tamiang.¹ Pengiriman dai perbatasan, sebagai program vital penyampai nilai agama (Islam) oleh Dinas Syariat Islam-guna membendung gencarnya ragam isu agama di perbatasan Aceh.

Pun demikian, dari cerita seorang petugas dai perbatasan, yang ditempatkan bekerja di Kecamatan Suro, dan ia juga bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Kecamatan yang sama, situasi tahun 2008 yang cukup fenomenal di tengah masyarakat Singkil benar-benar menegangkan, ia dan beberapa orang sempat digiring oleh polisi pada malam hari-melewati kerumunan manusia yang berdiri sepanjang jalan menuju arah Kantor Polsek setempat. Jika salah seorang warga beragama minoritas di sana melakukan provokasi pemukulan pada mereka yang digiring tersebut, konflik secara frontal antar-umat beragama akan meletus malam itu juga di Aceh Singkil. Kemelut dan potensi konflik SARA tersebut ternyata terus berlanjut, bahkan hampir kembali meletus pada tahun 2012.²

Jika merujuk paeda volume dan komposisi jumlah penduduk berdasarkan agama, dari data BPS Kabupaten Aceh Singkil (Tahun 2014), terutama Kecamatan Suro, sebagai kecamatan yang didominasi oleh dua agama besar (Islam dan Kristen), tercatat jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 6.550 jiwa (77.8 %), dan penganut agama Kristen sebanyak 1.738 jiwa (12.7%). Di sisi lain, sebenarnya juga berkembang keyakinan animisme, tercatat penganutnya sebanyak 125 jiwa (1.5%).³ Dalam aktivitas sosial, sebenarnya perbedaan agama dan kepercayaan, tidak menjadikan ruang gerak sosial masyarakat setempat terhambat, aktivitas *muamalah* seperti dagang, tetap berlangsung dengan baik, saling ketergantungan dan membutuhkan antar pemeluk agama.

¹ Dai Perbatasan merupakan istilah dari program yang dikerjakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, dengan mengutus beberapa sarjana agama ke wilayah perbatasan Aceh. Visi utama program adalah untuk menangkal proses pemurtadan, dan gempuran krsistenisasi yang dikhawatirkan terjadi pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan dan gencar isu tersebut, terutama wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, seperti Aceh Singkil. Lihat data Dinas Syariat Islam Aceh (2008).

² Konflik dispekulasi dipicu oleh penyegelan rumah ibadah gereja oleh Tim Penertiban Rumah Ibadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Tindakan ini dilakukan berdasar Peraturan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah, dan Peraturan Gubernur No 25/2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah, serta Surat Perjanjian Bersama antara Komunitas Islam dan Kristen dari Tiga Kecamatan di Aceh Singkil (Kecamatan Sumpang Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Danau Paris) yang diteken pada tanggal 11 Oktober 2001. Peraturan ini pula yang dipakai sebagai legitimasi aksi penyegelan. Lihat : <http://indonesia.ucanews.com/2012/05/09/warga-aceh-tak-inginkan-konflik-agama-terkait-penyegelan-gereja/> dan Lihat juga <http://aceh.tribunnews.com/2012/07/17/efektifkan-dialog-antar-umat-beragama>.

³ Lihat Statistik Daerah Kecamatan Suro 2014 (Katalog BPS : 1101002. 1102033), diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil.

Gesekan konflik agama di Aceh Singkil sebenarnya bukan hanya dipengaruhi oleh situasi pemantik, peracik bumbu konflik yang terlibat di sana dengan ragam kepentingan. Dari sisi historis, potensi konflik merupakan keberlangsungan sejarah. Menurut cerita beberapa warga yang berusia lanjut saat saya temui, saat meletusnya DI/TII di Aceh. Pentolan dan pemimpin DI/TII Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh, menurut informasi beberapa warga yang sudah lanjut usia di Aceh Singkil, pernah mengunjungi Singkil sebanyak dua kali, pada kunjungan pertama, ia datang hingga ke Kecamatan Pulau Banyak. Di Kecamatan Pulau Banyak, tepatnya di Desa Ujung Sialit mayoritas penduduk berasal dari Nias, dan beragama Kristen Protestan. Saat itu, Daud Beureueh sebagai pimpinan tertinggi DI/TII memerintahkan seluruh pemuda Muslim di desa lain (selain Desa Ujung Sialit) untuk mengusir penduduk Desa Ujung Sialit. Pengusiran penduduk Desa Ujung Sialit yang beragama Kristen, merupakan tonggak awal pemicu konflik antar-umat beragama di Aceh Singkil. Apalagi, setelah itu Daud Beureueh beserta elite Muslim di Aceh Singkil, membuat aturan tetap, hanya membolehkan bangunan gereja didirikan tidak lebih dari 3 (tiga).

Peraturan ini, tentu sangat mengganggu dalam kehidupan umat beragama di sana. Meskipun, seiring laju waktu, masyarakat Aceh Singkil mulai menyadari, bahwa peningkatan jumlah penduduk juga harus ikut serta bertambahnya bangunan tempat ibadah. Pun, pentingnya menjaga stabilitas damai di wilayah mereka, sebab ekonomi, apalagi klen kekerabatan dan marga menjadi modal sosial yang kian menyatukan mereka. Namun, kadang kesadara ini diusik oleh kehadiran partikel luar yang melakukan provokasi, dan memang keberadaan beberapa rumah ibadah liar (tanpa izin) dianggap sangat mengganggu oleh sebagian warga di sana. Situasi seperti ini, selalu menjadi pemantik konflik kemudian hari.

Namun demikian, ikatan klan, marga dan identitas sesama "Orang Singkil" kembali merajut kesadaran, bahwa keberlangsungan aktifitas sosial dalam bingkai damai sangat penting. Karena itu, saya mencatat beberapa istilah penting, sebagai benih benih perdamaian di sana, seperti "Kami berdamai, karena mereka klen dan marga saya." Kalimat yang sempat saya rekam, tentunya ini menjadi model resolusi konflik antar-umat beragama di Aceh Singkil dalam menjaga aktifitas kehidupan sosial di sana. Selain itu, kajian kajian mendalam tentang peta konflik antarumat beragama di Aceh Singkil, masih harus terus dilakukan, guna menemukan *lesson learn* untuk membendung ancaman konflik yang dapat meletus kapan saja.

Menjawab kegelisahan, dan minimnya kajian mengenai sebab dan proses rekonsiliasi konflik agama di Aceh Singkil, yang kemudian terbentuk secara proses sosial, maka saya mencoba menggali dan mengkaji fenomena sosial ini di tengah masyarakat

multikultural Aceh Singkil, yang didiami oleh ragam etnik dan agama. Kajian ini, tentunya masih jauh dari kesempurnaan, apalagi ke depan, diharapkan akan ada komparasi yang dapat memperkaya narasi. Namun, sangat diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran, pendapat mengenai gejala dan konflik sosial di wilayah perbatasan Aceh tersebut. Konflik umat antar-agama ini, saya coba jembatani dengan beberapa pendekatan antropologi, yang dapat memberikan narasi dan deskripsi utuh mengenai potret kehidupan umat beragama di Aceh Singkil.

Karena itu, diskusi mengenai kajian konflik antar-umat beragama dan proses rekonsiliasi yang terbangun lewat modal sosial, dan benih-benih kesadaran pada klen dan marga di Aceh Singkil, saya bangun lewat dua pertanyaan atau permasalahan akademik, agar mengarah pada deskripsi yang diharapkan (tidak bisa, dan meluas). Dua pertanyaan yang dianggap representatif tersebut adalah :

1. Bagaimana rekam jejak konflik antar-umat beragama di Aceh Singkil ?
2. Bagaimana pengaruh, dan kontribusi modal sosial, klen dan marga dalam membangun konsensus dan rekonsiliasi proses perdamaian konflik antar-umat beragama di Aceh Singkil ?

Dua pertanyaan di atas, tampak sudah cukup konstruktif untuk melihat potret konflik keagamaan dan proses menuju rekonsiliasi. Pun, sangat diharapkan akan menjadi model bagi penyelesaian konflik dalam bingkai multikultural. Karena itu, pembahasan mendalam nantinya akan diarahkan khusus pada dimensi kajian sosial dan kebudayaan, dengan pendekatan kajian antropologi, disertai rekam jejak sejarah yang dapat membantu menuntaskan narasi kajian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian untuk mengumpulkan data tentang fenomena sosial-konflik keagamaan, hingga terjadi proses rekonsiliasi di Kabupaten Aceh Singkil ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara spesifik, kajian ini menggunakan metode *Kultur Kreisen* atau *Cultural Method*, yaitu metode dalam antropologi dengan menggunakan daerah atau lingkungan kebudayaan sebagai sudut pandang manusia (Abdullah, 1997 : 20-21). Teknik pengambilan data dengan teknik *observation* (observasi) dan *depth interview* (wawancara mendalam). Peneliti juga melakukan perekaman data visual, dengan pemotretan memanfaatkan kamera foto, tetapi secara terpaksa data visual tidak ditampilkan dalam tulisan ini. Sebelum penelitian lapangan (*field research*) dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan kehidupan sosial, keagamaan dan kebudayaan masyarakat yang akan diteliti.

Strauss & Corbin (2003; 10-11) mengatakan bahwa, "Teori yang grounded adalah teori yang diperoleh secara induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskannya. Karenanya teori ini ditemukan, disusun, dan dibuktikan untuk sementara melalui pengumpulan data yang sistematis dan analisis data yang berkenaan dengan fenomena itu. Dengan demikian pengumpulan data, analisis, dan teori saling terkait dalam hubungan timbal-balik. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan satu teori tertentu lalu membuktikannya, tetapi dengan suatu bidang kajian dan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut".

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga yang lebih dipentingkan adalah kualitas dan kedalaman data, bukan kuantitas data seperti pada metode penelitian kuantitatif. Peneliti tidak memanfaatkan kuisioner sebagai instrumen penelitian, tidak ada hipotesa, tidak mencari korelasi antar variabel, tidak ada sebab dan akibat (causality), tidak ada analisis data statistik, tidak ada prosentase responden terhadap populasi, dan tidak ada istilah responden sebagai nara sumber pengumpulan data karena itu semua adalah poin-poin ciri khas pada metode penelitian kuantitatif. Sebaliknya peneliti memanfaatkan interview guidance (panduan atau pedoman wawancara) sebagai instrumen penelitian, yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan saat melakukan wawancara mendalam. Nara sumber penggalian data adalah key persons dan informan, bukan responden. Penggalian data difokuskan pada makna (meaning) yang ada di dalam pikiran informan terhadap konflik keagamaan dan proses mengonstruksi damai yang dia pahami, dia alami, atau dia saksikan.

Untuk mencapai lokasi penelitian, maka dari Kota Banda Aceh, peneliti melakukan perjalanan darat. Dari Aceh Singkil, terlebih dulu melakukan penelitian di Kecamatan Suro, sebagai kecamatan yang sempat menuai kemelut konflik, mengingat heterogenya penduduk setempat dari sisi agama, setelah itu melintasi Kecamatan Biskang, dan Kecamatan Gunung Meriah, guna melanjutkan dan melakukan penelitian di sana.

C. Potret Aceh Singkil

"Singkil" ejaan lama yang menggunakan "e," (lihat *Brochure Kabupaten Atjeh Selatan*, 1954) sebenarnya adalah wilayah yang memiliki hutan rawa luas, dan potensi laut membanggakan. Basis maritim, wisata, kebudayaan dan jejak sejarah merupakan potensi natural, dan modal budaya yang dimiliki wilayah ini. Bahkan, edisi Ekspedisi Cincin Api Kompas (26 Mei 2012) mengakui dan menarasikan potret masa lalu kegemilangan Singkil yang potensial. Selain itu, wilayah ini juga menyimpan khazanah ekologi, terutama lahan rawa Singkil tempat biaknya ekosistem biota rawa, dan berlindungnya suaka margasatwa yang menjadi aset ekologi penting teritorial di garis batas Aceh ini.

Dalam pentas sejarah sejak di bawah administrasi Provinsi Aceh, Aceh Singkil pada awalnya *include* dalam kewedanaan Kabupaten Aceh Selatan, sebagai kabupaten induk yang ikut menaungi beberapa kabupaten lain sebelum terjadi pemekaran. Setelah itu, mekar melahirkan beberapa kabupaten baru, diantaranya Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kota Subulussalam. Upaya pemekaran Singkil sebagai kabupaten tersendiri, telah dimulai sejak tahun 1956, atas inisiatif seorang Putra Meukek, bernama Almez. Pertemuan Almez di Jakarta dengan mantan wedanan pertama Singkil, bapak A Mufti AS, tokoh masyarakat Singkil-bapak Anhar Muhammad Husen memunculkan dorongan untuk menjadikan Singkil sebagai kabupaten yang otonom (merdeka dari kabupaten induk), mengingat Singkil memiliki wilayah dan sumber daya yang dapat dikelola sendiri. Pada tahun 1957, resmi dibentuk Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil (dikenal dengan istilah P APKOS). Gerakan penuntut ini, yang secara organisasi muncul nama-nama seperti Teungku M. Bakri, Lukman Hakim, Kamaluddin, Z.A Fachry, dan Munthe terus bergerilya (lobi politik) secara santun menuntut pemisahan-agar Singkil bisa berdiri otonom. Perjuangan itu membuahkan hasil 42 tahun kemudian, tepat pada tanggal 20 April 1999, lewat U.U. No 14 tahun 1999, Singkil resmi menjadi kabupaten sendiri, dengan nama Kabupaten Aceh Singkil. Bupati pertama yang dilantik adalah Makmur Syahputra, dan dilantik secara langsung di Jakarta oleh Mendagri, pada tanggal 27 April 1999. Pada tanggal 14 Mei 1999, peresmian secara resmi Kabupaten Aceh Singkil, dilakukan oleh Gubernur Aceh-Syamsuddin Mahmud di Lapangan Daulat Singkil, yang turut dihadiri oleh masyarakat setempat.⁴

Meskipun begitu, masih banyak pekerjaan yang membutuhkan kerja keras yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Aceh, elite dan rakyat Singkil, meski sudah independent selama 16 tahun lamanya. Sebagai wilayah garis batas, dan memiliki jarak teritorial jauh dengan pusat pemerintahan Aceh (pun secara geopolitik), Singkil memang tampak masih terisolir dari sisi pembangunan dan pelayanan publik. Betapa tidak, pucuk Singkil, atau lebih dikenal pusat pemerintahannya masih tampak regresif dan sengap dari laju gerak ekonomi (sebagaimana kota lain di Aceh), hal ini diperparah masih buntunya jalan tembus Aceh Singkil ke Kecamatan Buloh Sema Aceh Selatan, yang selalu diharapkan akan menjadi solusi melepas belenggu kota “sengap” ini.

Menurut data statistik (2008), Singkil terletak pada 2^o 02’-2^o 27’ 30^o Lintang Utara, dan 97^o 04’-97^o 45’ 00 Bujur Timur. Luas wilayah Singkil adalah 2.187 Km² dengan Batas Wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan (Trumon). Singkil, sebagai

⁴ Lihat (*Aceh Singkil dalam Angka, Aceh Singkil in Figures*, 2008 : vi-xii).

sebuah kabupaten memiliki 10 kecamatan, 15 kemukiman, dan 117 kampung/desa. Sebagian besar kampung di Singkil berada di wilayah daratan, dan selebihnya mendiami wilayah pesisir. Keberadaan masyarakat di dua topografi ini, pun menjadi garis batas dua tipologi masyarakat yang mendiami wilayah Singkil. Di pesisir, umumnya masyarakat memunculkan karakter Minang, dan di daratan-pedalaman karakter Batak mendominasi, di samping beberapa karakter budaya lain juga muncul (seperti Melayu, Aceh dan Jawa).

Kedatangan dan menetapnya orang-orang Aceh dan Jawa di Singkil, dapat dikatakan datang belakangan, setelah sebelumnya wilayah ini didiami sekian lama oleh suku Minang dan Batak. Orang-orang Aceh yang tergolong minoritas, umumnya mereka bekerja sebagai Pegawai Negeri dan pedagang di sana. Pun, orang-orang Jawa (sebagian besar transmigrasi) umumnya bekerja sebagai petani (sawit). Meskipun begitu, tak semua orang Aceh bertahan dan betah lama tinggal di Singkil, terutama mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri,⁵ biasanya setelah beberapa tahun bekerja di Singkil, mereka akan mencari jalan (lobi politik birokrasi) untuk pindah dan kembali ke kampung halamannya. Fenomena ini, dapat dipahami sebagai bagian ketidakmampuan *survive* manusia untuk hidup di lingkungan berbeda karena jarak budaya, dan situasi Singkil yang cenderung sempit dibanding lingkungan asal mereka. Namun, sikap ini juga ikut mencederai tatanan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh mereka (Pegawai Negeri) yang mendapat jatah bekerja di Singkil, terutama masyarakat setempat menjadi korban dari kehampaan kehadiran negara. Seperti guru, dan tenaga kesehatan yang menjadi pekerjaan vital dan kebutuhan dalam pembangunan sebuah kawasan terisolir dari pusat kota provinsi seperti Singkil. Karena itu, ragam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat (sebagai solusi), terutama mengangkat putera daerahnya, menjadi tindakan rasional, untuk menghindari fenomena hengkangnya Pegawai Negeri yang hanya mencoba peruntungan di Singkil.

Hampir di seluruh pelosok Aceh Singkil, sebagian besar manusia di sana akan berbicara bahasa Pakpak dan Boang, meskipun beberapa kata telah mengalami modifikasi dengan bahasa Tapanuli dan Minang. Pun, secara demografi, penduduk Singkil sekarang mayoritas adalah suku Pakpak dan Boang. Mereka telah menjadi representasi Aceh Singkil dalam kurun waktu yang cepat, dan harus diakui dalam geopolitik Aceh, mereka

⁵ Situasi ini sangat berbeda dengan pendatang dari Pulau Jawa, yang terpaksa harus tinggal dan menetap selamanya di Singkil, dengan beberapa alasan, seperti kemungkinan sulit untuk kembali ke daerah asal mereka yang jauh, dan keinginan mereka yang kuat untuk mengubah hidup di wilayah baru (transmigrasi). Apalagi, para transmigrasi pergi bersama keluarga besar mereka, dan penduduk sewilayah yang sama dalam jumlah yang besar. Jadi, interaksi budaya yang sama (alasan mampu bertahan hidup di lingkungan berbeda) masih dapat diteruskan tanpa harus mengalami perasaan jarak budaya.

bagian dari suku-suku (Aceh) minoritas, yang hidup dan menetap di Aceh (selain suku-suku yang telah lama diakui sebagai bagian penting dari keacehan, seperti *Jamee, Kluet, Melayu, Alas*, dan beberapa yang lain). Kehadiran mereka, ikut memperkaya khazanah budaya keacehan. Pun demikian, sepanjang lintas sejarah berikutnya, Singkel akan terus mengalami interaksi budaya tanpa henti, mengingat wilayah ini apik bagi pendatang, baik dari Aceh, Sumatera Utara hingga Pulau Jawa terus menerus. Pertemuan banyak suku di Singkel, menampilkan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut ini semakin heterogen (budaya).

Sebagai kesatuan etnik tersendiri, Singkil otonom secara budaya, mereka memiliki tradisi, bahasa, kultur, dan adat istiadat yang berkembang sesuai karakteristik masyarakatnya (dominasi Minang, Batak dan Melayu). Pun demikian, Singkil telah mewarnai Aceh dalam bingkai diplomasi budaya dan multikultur Aceh. Karena itu, keseriusan pemerintah Aceh untuk memperhatikan wilayah ini secara serius dituntut, guna mengedepankan perhatian cukup pada pembangunan wilayah minoritas etnik Aceh ini, terutama mereka yang hidup memprihatinkan di perbatasan (terkait pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya).

Di sisi lain, persoalan ekonomi, masih menjadi isu vital di wilayah ini. Di beberapa titik komunitas, kemiskinan menampilkan sisi kontras, dan persoalan lainnya, termasuk ekologi seiring ekspansifnya industri perusahaan sawit di sana. Kemiskinan di Singkil, tak bisa dikaji lewat angka-angka, karena struktur sosial masyarakat di sana (pada beberapa titik) menampilkan atribut kemiskinan yang memprihatinkan, baik akibat intervensi struktural maupun kultural. Fenomena ini, sangat berpotensi pada kesenjangan sosial yang semakin renggang, dan (kemungkinan) munculnya patologi sosial.

Dalam potret media skala lokal dan nasional, wacana wilayah ini hanya kerap muncul dalam isu-isu tertentu. Dalam konteks wacana sosial, Aceh Singkil cenderung disorot dari dua kasus besar. *Pertama*, persoalan potensi konflik kerukunan beragama, dan *kedua*, potensi kisruh perusahaan sawit dan masyarakat. Namun, untuk kasus *pertama* terkait persoalan agama, diskusi tentang isu tersebut harus dikaji ulang, mengingat realitas tak seheboh yang dinarasikan publik luar. Sebaliknya, justru Singkil bisa menjadi *pilot project* kerukunan ummat beragama, bagaimana benih-benih perdamaian terkonstruksi dengan baik, lewat sistem kekerabatan, marga dan visi yang kolektif di wilayah ini. Karena itu, yang harus dilakukan oleh agen opini publik, adalah menampilkan pula sisi lain yang akan menjadikan Singkil sebagai daerah yang humanis.

D. Kemelut Atas Nama Agama

Pada dasarnya, sebagaimana kata Durkheim, agama memainkan peranan fungsi pada prinsip solidaritas sosial, yang mempertalikan masyarakat (khusus pada kelompok

agama) (Abdullah, 1997: 31). Karena itu, agama dan moral bersumber dari *collective representations* bukan *individual mind*, ia selalu hadir dengan wajah kelompok. Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah justru menyebut agama adalah wahyu, bukan pikiran manusia yang melahirkan metoder berpikir dalam kehidupan sosial.

Harus diakui, bahwa manusia menuntut setiap orang tanpa kecuali harus dihormati, menurut hak-hak asasinya, dan bahwa orang apapun tidak boleh dipersaldokan demi kemajuan yang lain-lain, bahwa setiap pemerksaan, setiap pemelaratn seseorang atau sekelompok orang demi suatu kepentingan, pun pula kepentingan bagian terbesar masyarakat, tak dapat dibenarkan (bertentangan dengan dasar martabat manusia) (Suseno, 2001 : 17).

Pasca 30 tahun pemerintahan Orde Baru, persatuan suku-suku, ummat beragama, etnik, dan ras tampak masih rapuh. Alasan secuil apapun, akan menjadi alat provokasi, hasutan, hingga rekayasa yang terencana yang dapat memicu konflik komunal. Konflik tersebut, bukan hanya primordial (antar-suku, berdasar sentimen agama, antara penduduk asli dan pendatang yang bersifat horizontal), melainkan juga vertikal (antara mereka dengan elite). Ini merupakan penanda bahwa jangkauan solidaritas sosial semakin menyempit, yang terjadi justru desosialisasi, di mana individu menarik diri ke dalam lingkungan komunitasnya yang semakin sempit, hingga muncul perasaan dicurigai, dicemburui, dibenci, dan jika muncul insiden kecil-rasa balas dendam cepat bergolak (Suseno, 2001 : 24-25).

Simon Fisher (2001) menyatakan bahwa "*Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau (individu dan kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif*" (dalam Tumanggor, dkk (ed), 2004 : 6). Sedangkan, Goldrick dan Lynch (2001) menyebut konflik sebagai proses tatkala dua atau lebih pelaku mencoba untuk mencapai tujuan yang saling berlawanan dengan mengabaikan proses pencapaian tujuan yang saling berlawanan dengan mengabaikan proses pencapaian tujuan dari pihak-pihak lain." (Munawar M Saad, 2003 : 10, dalam Tumanggor, dkk (ed), 2004 : 14).

Konflik merupakan bagian dan sekaligus resiko kehidupan bermasyarakat. Konflik antar suku, agama dan mazhab dalam agama sendiri akan selalu terjadi. Di sisi lain, fenomena kerusakan bukan saja karena aktor, tapi karena tidak berfungsinya sistem sosial. Fungsionalisme Struktural yang dicetuskan Durkheim, mengklaim bahwa selalu melihat masyarakat yang terdiri dari bahagian-bahagian yang selalu dalam kondisi seimbang, atau selalu menafikan konflik. Namun, begitu ada perubahan pada satu bahagian, yang lain pun akan ikut berubah (Tumanggor, dkk (ed), 2004 : 74-75).

Beberapa media tahun 2013, bekerja dan mempublikasi pada publik-dengan harapan terciptanya opini, mengenai penampakan situasi sosial yang seakan genting

(konflik agama) di Aceh Singkil. Meskipun, narasi yang ditampilkan oleh media, sering tak seheboh realitas di lapangan. Kerja-kerja media, secara tidak langsung ikut menggiring semakin tak kondusifnya kehidupan umat-beragama di daerah perbatasan Aceh-Sumatera Utara tersebut.

Manusia Singkil, hidup dalam keberagaman sistem kepercayaan yang tinggi. Terutama, pada persoalan agama sebagai identitas sosial vital. Karena itu, di beberapa tempat di Singkil, kadang Islam lebih mendominasi, di tempat lain, justru agama seperti Kristen yang akan menjadi masyarakat mayoritas. Namun, itu tak menjadi persoalan konflik, sebagaimana sering dipersoalkan oleh opini yang berkembang di luar teritorial Singkil. Apalagi, kehidupan sosial antar-manusia di sana lebih menonjol, seperti dari sektor dagang daripada mempersoalkan kepercayaan. Bahkan, masyarakat di sana, biasa menetap bersebelahan rumah dengan tetangga yang berlainan agama.

Penting untuk dicatat, bahwa percikan kemelut agama di Singkil, sering sekali muncul lewat konsep hiperbola pemberitaan media, apalagi narasi tersebut jarang dapat dipertanggungjawabkan secara faktual, terutama apa akar dari persoalan yang sedang terjadi di sana. Media sebagai partikel dagang, sering terjebak hanya pada kontestasi oplah, setiap isu dan wacana sering dilakukan dengan pola hiperbola, guna diminati saat dikonsumsi oleh publik. Namun, di sisi lain-efek yang muncul dari wacana yang ditelurkan ini, justru dapat menjadi material provokasi yang dapat mendorong meletusnya konflik.

Meluasnya pemberitaan media mengenai konflik agama di Singkil, terus ditafsirkan beragam oleh pihak luar. Apalagi, beberapa media nasional ikut menyudutkan pemeluk agama tertentu (sebagai pelaku) dalam kasus tersebut. Kerja-kerja media seperti ini kian memperuncing persoalan yang seyogyanya dapat diredam, justru menjadi kemelut baru. Masyarakat Singkil, yang belum melek secara masif terhadap pemberitaan media, justru tak sempat menafsirkan dan menganalisis lebih jauh apa yang sedang terjadi antara mereka, dengan publik luar yang memandangi mereka. Bagi masyarakat Singkil sendiri, kelompok, klan dan marga mereka lebih penting dari persoalan yang diperdebatkan oleh banyak pihak. Karena itu, situasi internal sebagaimana saya rasakan, berbanding terbalik dengan narasi media yang memberi penekanan dengan cara hiperbola.

Memang, jika dilihat secara detail, sikap membedakan diri dengan pemeluk agama berbeda, sering terjadi di Singkil. Misalnya seorang mahasiswi Muslim yang saya wawancarai, mereka bersama teman-temannya pernah dilarang oleh penganut agama mayoritas (Kristen) di sebuah kampung, saat akan melaksanakan kegiatan agama di sana. Selain itu, tumbuhnya *udung udung* sebagai tempat ibadah liar, sering dipersoalkan oleh penganut agama Muslim. Namun, menariknya perbedaan dan jarak sosial tersebut, tak tampak terlalu rumit. Masing-masing pihak menyadari dan berusaha menahan diri dari perbedaan. Dalam kehidupan sosial, sikap hidup sebagai identitas masyarakat Singkil, Klan, dan Marga justru lebih penting.

E. Benih benih Perdamaian atas Nama Klan dan Marga

Dalam beberapa kajian sosial, ada beberapa modal sosial yang menjadi benih perdamaian pada tempat yang berbeda. Pun demikian, dari kajian dan penelitian Imam Suprayogo di Desa Sitarjo Kota Malang (2000), kerukunan umat beragama, ditopang oleh beberapa faktor :

1. Faktor tradisi, sebagaimana tradisi pedesaan yang bercirikan paguyuban, gotong royong, dan tolong menolong.
2. Faktor aliran dan mazhab, yang didominasi oleh aliran moderat, dalam kalangan ummat Islam mayoritas adalah NU, sedangkan di pihak gereja adalah GKJW (Gereja Kristen Jawa Wetan).
3. Faktor dakwah, dan misi yang menekankan pada aspek kemanusiaan dan kerja sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.
4. Faktor kerjasama antara tokoh agama dengan umatnya, antar tokoh agama, dan antar tokoh agama dengan aparat pemerintah.
5. Terbentuknya persepsi antar umat beragama, bahwa perbedaan agama merupakan hal yang wajar dan harus diterima di tengah kehidupan manusia.
6. Faktor kondisi sosial ekonomi yang cukup sejahtera meskipun tidak tergolong tinggi, turut menciptakan suasana tenteram dan damai.
7. Tidak ada provokasi yang menimbulkan perpecahan, baik oleh masyarakat, tokoh maupun pihak ketiga (Suprayogo, 2001 dalam Tumanggor, dkk (ed), 2004 : 6-7).

Selain itu, salah satu buku yang menarik mengupas sisi rekonsiliasi dari perspektif antropologi, adalah *Ken Sa Faak, Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*, yang ditulis oleh Pieter Elmas, dkk (2004). Narasi dalam buku ini, setidaknya memberikan wacana, pelajaran dan metodologi bagaimana seharusnya sebuah konflik berbasis SARA diselesaikan. Buku ini, memotret konflik yang terjadi di sebuah Pulau dekat Ambon, Kepulauan Kei. Masyarakat Kei merupakan masyarakat penerima imbas konflik antarumat beragama di Ambon. Namun, kemudian kesadaran akan klan dan kekerabatan mereka sebagai orang Kei, justru menjadi modal sosial dalam meredam konflik di kepulauan tersebut.

Kasus proses rekonsiliasi di Singkil, hampir sama dengan yang terjadi di Kepulauan Kei. Masyarakat memiliki modal sosial kekerabatan, klan dan marga dalam membangun konsep damai antar mereka. Bedanya, jika di Kepulauan Kei sudah banyak nyawa manusia yang terenggut, di Singkil belum ada korban jiwa. Namun, mereka memiliki modal sosial tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan meletusnya konflik antarumat beragama di sana. Bahkan, dari. penuturan beberapa informan, terutama ibu-ibu yang sempat saya temui di beberapa majlis taklim pengajian, mereka menuturkan pentingnya arti kekerabatan dan solidaritas sebagai masyarakat Singkil. Karena itu, titik jaringan kekerabatan antar-umat beragama di sana menjadi modal sosial meredam konflik.

Karena itu, ada tiga partikel dan unsur penting dalam melahirkan konsensus dan rekonsiliasi meredam konflik agama di Aceh Singkil, seiring munculnya kesadaran pada *sustainable livelihood* masyarakat di sana. Tiga partikel, dan unsur penting tersebut adalah :

1. Kesadaran tinggi akan klen dan marga, setiap warga di Singkil meksipun berbeda agama, namun kadang mereka memiliki marga yang sama.
2. Kesadaran akan interkoneksi jaringan ekonomi. Aktifitas ekonomi merupakan basis keberlangsungan interaksi manusia di sana, terutama di pasar. Karena itu, jika konflik agama dipaksakan meletus, maka akan mengancam aktifitas ekonomi, dan
3. Kesadaran pada kehidupan di satu wilayah yang sama, mereka menyadari sebagai komunitas yang hidup dalam teritorial yang sama, yaitu wilayah Aceh Singkil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syamsuddin, 1997, *Agama dan Masyarakat; Pendekatan Sosiologi Agama*, Jakarta: Wacana Ilmu.
- Aceh Singkil dalam Angka, Aceh Singkil in Figures*, 2008.
- Bustamam-Ahmad, K. 2014. Islam dan Kekerasan: Pengalaman untuk Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 67-80.
- Dumanig, Francisco Perlas. 2014. Social Capital and Politeness Strategies in Fostering Ethnic Relations in Malaysia and Philippines. Dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2, No. 3, September 2014.
- Hermawan, S. 2014. Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 81-96.
- Karibi, R. A. I. N. 2015. Religion, Human Rights and the Challenges of Freedom. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 39-54.
- Murziqin, R. 2013a. Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. 2014. Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Pieter Elmas, dkk. 2004. *Ken Sa Faak, Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*, Yogyakarta.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suseno Franz Magnis, 2001, *Kuasa dan Moral*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tabrani ZA. 2011. Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tumanggor, dkk (ed), 2004, *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat di Tanah Air*, Jakarta: LEMLIT dan LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.